

IMPLEMENTASI PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG

Amrin¹, Muhmudah Kamal Mahmud², Ardika Nurfurkon*³

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor 45363, Indonesia;
e-mail: amrin@ipdn.ac.id

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor 45363, Indonesia;
e-mail: mahmudah@ipdn.ac.id

³Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor 45363, Indonesia;
e-mail: ardika.nur@ipdn.ac.id

*Correspondence

Received: 29-05-2023; Accepted: 27-06-2023; Published: 30-06-2023

Abstrak: Perencanaan pembangunan merupakan proses dalam menetapkan suatu capaian yang terarah dengan adanya program dan sasaran, implementasi dan evaluasi. Masalah tersebut telah menunjukkan bagaimana Bappppeda sebagai perangkat daerah dalam implementasi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kami menganalisis kualitas perencanaan berdasarkan indikator yang diimplementasikan pada Bappppeda Kabupaten Sumedang dan memberikan hasil yang akan berkontribusi pada pengembangan bidang perencanaan pembangunan. Dalam artikel ini, kami berpendapat bahwa kualitas perencanaan pembangunan yang baik dapat dilihat dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perencanaan yang baik. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi literatur dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, dokumen dan laporan perencanaan). Hasilnya menunjukkan bahwa adanya kualitas perencanaan pembangunan pada Bappppeda Kabupaten Sumedang dapat diunggulkan dengan adanya peningkatan pada keterlibatan unsur pemangku kepentingan dan peningkatan intensitas koordinasi perencanaan antar perangkat daerah yang terlibat dengan Bappppeda. Sedangkan hambatan yang ditemui yaitu proses pemantauan dan evaluasi terutama pada optimalisasi *quality control* data.

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Kualitas Perencanaan, Implementasi Pembangunan

Abstract: *Development planning is the process of determining an achievement that is directed by the presence of programs and targets, implementation, and evaluation. This paper has shown how Bappppeda, as a regional apparatus, implements quality improvement in regional development planning. We analyze the quality of planning based on the indicators implemented at Bappppeda Sumedang Regency and provide results that will contribute to the development of the field of development planning. In this article, we argue that the quality of good development planning can be seen by applying the principles of good planning governance. The data used in this study were obtained from literature studies and secondary data (laws and regulations, planning documents, and reports). The results show that the quality of development planning at Bappppeda Sumedang Regency can be favored by increasing the involvement of stakeholders and increasing the intensity of planning coordination between regional apparatuses involved with Bappppeda. While the obstacles encountered are the monitoring and evaluation process, namely the optimization of quality control data.*

Keywords: *Development Planning, Quality Planning, Implementation Development*

I. Pendahuluan

Penelitian tentang perencanaan pembangunan semakin berkembang sampai saat ini, dimana permasalahan seperti partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Bhusal dan Pandeya, 2022) dan sumber daya dalam strategi pembangunan daerah (Parlaungan, 2020). Akan tetapi dalam membahas terkait perencanaan pembangunan masih sedikit yang dihubungkan dengan strategi dari perangkat daerah terutama dalam membahas kualitas perencanaan pembangunan terutama fokus pada implementasinya. Sehingga dengan adanya pembahasan tersebut terciptanya suatu prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian dari Sahoo & Kumar Dash (2009) merupakan salah satu penelitian yang membahas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat harus adanya kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang lebih diprioritaskan. Penelitian lain juga membahas pengelolaan pembangunan daerah yang baik dan efektif dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Soliha, 2022).

Perencanaan pembangunan daerah dapat berfokus pada peningkatan diversifikasi ekonomi dengan mengidentifikasi dan mendukung industri, sektor, dan peluang bisnis baru. Dengan mendiversifikasi ekonomi regional, inisiatif perencanaan dapat mengurangi ketergantungan pada satu industri atau sektor, menjadikan daerah lebih tahan terhadap guncangan dan penurunan ekonomi. Selain itu, buruknya perencanaan pembangunan daerah dapat mempengaruhi ekonomi suatu daerah tersebut (Ferdian, 2021). Penelitian ini sebelumnya juga hanya membahas bahwa perencanaan pembangunan menekankan pada analisis perencanaan pembangunan pemerintah daerah serta hanya membahas terkait pergeseran struktur ekonomi terhadap perencanaan pembangunan.

Dari beberapa literatur sebelumnya, dapat dilihat masih sedikit yang membahas tentang peningkatan kualitas perencanaan dari pemerintah daerahnya terutama perangkat daerah yang mengkaji perencanaan pembangunan terutama pada kualitas perencanaan sehingga adanya kesesuaian antara Rencana Strategis (Renstra) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap RPJMD, Rencana kerja (Renja) terhadap RKPD dan tingkat ketercapaian target pembangunan daerah. Padahal dalam dampak kualitas perencanaan pembangunan yang berkualitas dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah yang efisien dan efektif. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pasal 2 ayat (2) sistem perencanaan

pembangunan nasional disusun harus secara sistematis, terarah, menyeluruh, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

Penelitian ini membahas bagaimana implementasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah selaku perangkat daerah dalam perencanaan yang berkualitas dalam capaian perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Fokus masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu kualitas perencanaan pembangunan pada Bappppeda Kabupaten Sumedang.

II. Kajian Pustaka

1. Implementasi Pembangunan

Konsep implementasi perencanaan strategis pembangunan terdapat 3 (tiga) tahap, yaitu (1) penciptaan visi, (2) perencanaan strategis, dan (3) implementasi rencana. Dalam setiap tahapan ada proses pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi baru, perubahan taktik, namun tidak jauh dari visi yang dirumuskan penguasa dan warga (Ciegis, at all, 2005). Pemerintah daerah yang berorientasi pada pembangunan harus memiliki pendekatan manajemen pembangunan yang strategis (atau digerakkan oleh misi) (Burger,1997).

Kennedy, (2011) juga menjelaskan adanya manajemen pemangku kepentingan dalam implementasi pembangunan yang berkualitas. Pendekatan implementasi yang efektif harus mencakup jangkauan luas, analisis dan intervensi strategis, dan tindakan berurutan bertahap, perencanaan yang terlibat, dan prosedur manajemen yang jelas. Pendekatan ini menekankan pada lingkungan dan identifikasi faktor penting untuk keberhasilan implementasi (Khan. J, 1999).

2. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan diidentifikasi sebagai: menetapkan alasan untuk mencapai kemampuan masa depan dan kemudian menerjemahkannya ke dalam rencana pencapaian yang logis dan terstruktur dengan baik (Frick,1976). Perencanaan pembangunan yang baik dan berhasil maka harus adanya adanya program, perencanaan, implementasi, evaluasi yang melibatkan masyarakat. Hal tersebut dapat diartikan sebagai perencanaan partisipatif dengan melibatkan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu dalam perencanaan pembangunan, masyarakat lebih paham akan potensi dan kondisi sumber daya alam serta permasalahan yang ada. Perencanaan tersebut dilakuakn melalui system perencanaan pembangunan daerah (Nurcholif et al., 2009:12-16).

Pendapat lain dari Riyadi dkk. (2005) menjelaskan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahap dan proses yang tepat dalam merumuskan pengambilan kebijakan. Proses tersebut dibutuhkan data dan fakta sebagai landasan yang sistematis guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam perumusan keputusan-keputusan atau alternative-alternatif yang didukung pada fakta-fakta dan data-data sebagai bahan untuk melakukan suatu aktifitas atau kegiatan dalam masyarakat secara material (fisik) dan spriritual dan mental (non-fisik) untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik (Mukmin, 2017:3).

3. Kualitas Perencanaan Pembangunan

Ada beberapa upaya untuk mendefinisikan karakteristik kualitas perencanaan. Karakteristik yang paling berpengaruh dalam kualitas perencanaan pada kebijakan dari pemerintah daerah untuk mencapai implementasi perencanaan yang meliputi fakta, tujuan dan kebijakan (Berke, 1994). Perencanaan strategis dianggap penting untuk menciptakan nilai publik, yang melibatkan peningkatan kualitas hidup dan memastikan manfaat berkelanjutan dari institusi publik dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti (Bryson, 2018).

Penelitian ini menggunakan kerangka kualitas perencanaan dan dianalisis tentang kualitas perencanaan yang memiliki sembilan indikator yaitu (1) Kebijakan yang terdiri dari visi, misi, nilai dan prinsip (2) fakta (3) keterlibatan pemangku kepentingan (4) Tujuan Umum (5) Sasaran Khusus (6) Implementasi (7) Pemantauan dan Evaluasi (8) Koordinasi (9) Perencanaan Organisasi dan Presentasi (Berke et al., 2006 , Berke dan Godschalk, 2009 , Horney et al., 2017 , Stevens, 2013).

III. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupaya menyajikan konsep implementasi dalam perencanaan pembangunan dihubungkan dengan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Metodologi dasar merupakan alat untuk menghasilkan teori dan sarana untuk melakukan penelitian kualitatif (Lawrence dan Tar, 2013).

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis studi literatur dengan mendeskripsikan implementasi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah oleh Bappppeda Kabupaten Sumedang. Penggunaan analisis studi literatur biasanya menggunakan teori atau pendapat para ahli yang dijadikan sebagai

sumber utama kemudian didukung dengan data sekunder. Pada penelitian ini, dalam mengumpulkan data menggunakan data sekunder yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang, RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, LAKIP Tahun 2019 Bappeda Kabupaten Sumedang, Buku Literatur dan Jurnal.

IV. Hasil dan Pembahasan

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penataan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sumedang merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mempromosikan inisiatif pembangunan di tingkat daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang dalam wilayah geografis tertentu. Mereka bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki infrastruktur, mempromosikan keadilan sosial, dan melindungi lingkungan di tingkat regional. Tujuan dan sasaran khusus dari badan perencanaan pembangunan daerah dapat bervariasi berdasarkan prioritas dan tantangan daerah yang mereka layani.

Implementasi pembangunan dapat dilihat dari pelaksanaan dan pemantauan rencana pengembangan kualitas membutuhkan mekanisme implementasi dan proses pemantauan yang efektif. Itu harus menguraikan tindakan, tanggung jawab, dan jadwal yang jelas. Pemantauan dan evaluasi rutin membantu menilai kemajuan, mengidentifikasi kekurangan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan keefektifan rencana (Kenedy, 2011). Perencanaan pembangunan memiliki sasaran waktu yang jelas sebagai awal dalam proses pembangunan. Secara umum, proses implementasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan prioritas pembangunan serta realisasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga perencanaan dilakukan secara bertahap mulai dari bawah dari masyarakat hingga pada tahap kebijakan dari pemerintahan daerah.

Penelitian ini menggunakan indikator yang telah dipaparkan pada bagian tinjauan pustaka, terdapat 9 (sembilan) indikator untuk melihat kualitas perencanaan pembangunan daerah untuk melihat implementasi rencana strategis pada badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Sumedang.

1. Kebijakan yang terdiri dari visi, misi, nilai dan prinsip

Kebijakan merupakan mekanisme berorientasi tindakan yang memandu pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan rencana. (Baker et al., 2012, Horney et al., 2017). Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Bappppeda Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran rencana strategis periode 2018-2023 sehingga adanya arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Bappppeda periode 2018-2023 yang selaras dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Adapun dalam misi tersebut Bappppeda mengemban misi nomor 4 (empat) yakni “Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat” (Renstra Bappppeda, 2018). Visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran didukung dengan strategi dan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif, sehingga perencanaan pembangunan menjadi berkualitas dan terarah. Peneliti mendeskripsikan dari dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 dan Renstra Bappppeda 2018-2023 keselarasan dari strategi dan arah kebijakan yaitu dengan menjabarkan visi misi Bupati Kabupaten Sumedang. Hal ini dapat dilihat pada tabel keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikatornya pada tabel berikut:

Tabel 1. Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran serta Indikatornya dihubungkan dengan Arah Kebijakan Jangka Menengah Bappppeda Kabupaten Sumedang

VISI RPJMD : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023					
MISI RPJMD : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat					
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD	Mendorong integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan serta penganggaran pembangunan	Mengoptimalkan perencanaan pembangunan <u>partisipatif</u>	
		Tingkat Kesesuaian RKPd terhadap RPJMD		Mengoptimalkan koordinasi dan verifikasi perencanaan pembangunan melalui bilateral dan trilateral <u>desk</u>	
		Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPd		Mengoptimalkan pembangunan pengaplikasian sistem satu data	
		Tingkat <u>Ketercapaian</u> Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik"		Peningkatan kapasitas analisis data pembangunan	
Mengoptimalkan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam implementasi perencanaan pembangunan	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan	Memantapkan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan koordinasi unit pengendalian, pemantauan dengan unit perencana dalam hal pencapaian target rencana pembangunan	
		Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya Kapasitas dan <u>Kapabilitas</u> Internal Perangkat Daerah	Nilai <u>Sakip</u> Perangkat Daerah	Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan
Tingkat Penyerapan Anggaran	Melakukan kegiatan <u>kelitbang</u> untuk menghasilkan <u>output</u> yang dapat mengakselerasi pembangunan				
Jumlah Inovasi	Membangun budaya instansi pemerintah <u>kearah</u> budaya yang transparan, <u>akuntabel</u> dan melayani			Peningkatan akuntabilitas kinerja	
Indeks Pembangunan Zona Integritas	Pengendalian tingkat penyerapan anggaran dalam pencapaian target rencana <u>pembanguan</u>				
				Pelaksanaan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dan reformasi birokrasi	
				Menciptakan Inovasi yang dapat mengakselerasi target rencana pembangunan	

(Sumber: Lakip 2019 Bappppeda Sumedang)

2. Fakta Basis

Fakta basis dalam penelitian ini bertujuan untuk fondari empiris dalam perencanaan yang digunakan untuk memprioritaskan dari tujuan dan kebijakannya (Baer, 1997 , Horney et al., 2017). Badan perencanaan pembangunan daerah harus terlibat dalam proses perencanaan strategis untuk menetapkan tujuan pembangunan jangka panjang untuk daerah tersebut. Mereka melakukan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis tren, dan mengidentifikasi peluang dan tantangan di wilayah tersebut. Informasi ini menjadi dasar untuk merumuskan rencana pembangunan daerah yang memandu prakarsa dan investasi di masa depan. Bappppeda Sumedang memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Mereka menilai kebijakan yang ada, mengusulkan kebijakan baru, dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah regional seperti diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, kelestarian lingkungan, dan inklusi sosial. Selain itu, mereka bekerja untuk menerapkan kebijakan ini dengan mengoordinasikan tindakan di antara berbagai pemangku kepentingan dan memantau kemajuan. Secara fakta basis yang diuraikan, adanya arah kebijakan yang ditetapkan oleh Bappppeda Kabupaten Sumedang dapat menjabarkan dan prioritas dari tujuan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah terutama pada Bappppeda Kabupaten Sumedang.

3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Perencanaan yang berkualitas harus adanya keterlibatan pemangku kepentingan, tujuan partisipasinya, hubungan, dan tinjauan bagaimana rencana tersebut telah berkembang (Berke et al., 2006). Bappppeda Kabupaten Sumedang dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas yaitu adanya keterlibatan unsur pemangku kepentingan yaitu DPRD, Instansi Vertikal, LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Asosiasi, Sektor Swasta dan Lembaga (Renstra Bappppeda Sumedang, 2019) Badan perencanaan pembangunan daerah biasanya berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, bisnis, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba. Hal ini untuk meningkatkan intensitas fasilitas dan koordinasi serta meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang partisipatif. Mereka memfasilitasi koordinasi di antara entitas-entitas ini untuk memastikan bahwa upaya pembangunan selaras dan saling mendukung. Dengan mempromosikan kolaborasi, lembaga-lembaga ini dapat memanfaatkan sumber daya, keahlian, dan pengetahuan untuk mengatasi tantangan regional secara efektif.

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penelitian ini juga berhubungan dengan penggunaan sumberdaya. Pada tahun anggaran 2019 efisiensi penggunaan Sumber Daya Bappeda Kabupaten Sumedang sesuai dengan indikator sasaran telah melaksanakan program dengan Capaian Memuaskan. Artinya adanya kesesuaian antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran dihubungkan dengan tingkat efisiensi kinerja tersebut.

4. Tujuan Umum

Tujuan berasal dari basis fakta dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. (Heidrich et al., 2013) Tujuan telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Sumedang sebagai dasar dalam menentukan strategi dalam perencanaan yaitu (1) meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi dalam pembangunan daerah (2) optimalisasi dalam sinkronisasi dan integrasi dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan. (3) pemanfaatan dalam hasil penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah (Lakip Bappeda Sumedang, 2019). Dari uraian di atas sesuai dengan indikator tentang tujuan, tujuan tersebut menjadi strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian perencanaan pembangunan. Tujuan umum perencanaan pembangunan adalah untuk mengarahkan dan mengelola pertumbuhan, transformasi, dan peningkatan wilayah atau komunitas tertentu secara sistematis dan terkoordinasi. Ini melibatkan penetapan tujuan, merumuskan strategi, dan menerapkan tindakan untuk membentuk aspek pembangunan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

5. Sasaran Khusus

Sasaran merupakan elemen penting dari rencana strategis berkualitas tinggi. (Baskici, 2020) dari hasil penelitian dari data sekunder terdapat sasaran perencanaan strategis yang dilaksanakan oleh badan tersebut, yaitu (1) dalam bidang perencanaan ialah meningkatkan perencanaan pembangunan (2) bidang penelitian dan pengembangan ialah peningkatan dan pelaksanaan hasil penelitian dan pengembangan daerah (3) bidang sumber daya ialah peningkatan kapabilitas dan kapasitas perangkat daerah. Bappeda Kabupaten Sumedang dalam menentukan penilaian kinerja perencanaan pembangunan menggunakan indikator sasaran yaitu (1) tingkat kesesuaian Renstra terhadap RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) (2) tingkat kesesuaian RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) terhadap RPJMD (3) tingkat kesesuaian Renja (Rencana Kerja) terhadap RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) (4) tingkat ketercapaian target pembangunan daerah yang berkategori baik dan (5) Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan.

6. Implementasi

Implementasi melibatkan komitmen untuk mengimplementasikan tujuan rencana, termasuk identifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan yang diuraikan dalam rencana. (Lyles et al., 2016) dapat dilihat dalam tabel bagaimana implementasi peningkatan perencanaan pembangunan dan implementasi penelitian dan pengembangan daerah dari target dan realisasi tahun 2019 Bappppeda Kabupaten Sumedang.

Tabel 2. Perbandingan Implementasi Perencanaan antara Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018 dan 2019 dan Target Renstra Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Renstra
					2018	2019	
Menata Birokrasi Pemerintahan Yang Responsif dan bertanggung jawab secara professional dalam pelayanan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD	Persen	85 %	100 %	100 %
			Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	Persen	85 %	100 %	100 %
			Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD	Persen	85%	100 %	100 %
			Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik"	Persen	96,50%	100 %	100 %
	Mengoptimalkan hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Implementasi Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	Persen	80 %	100 %	100 %

Sumber: Renstra Bappppeda Sumedang 2018-2023

Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan implementasi perencanaan dan realisasi dari tahun 2018 yang rata-rata mempunyai realisasi 85% meningkat pada tahun 2019 yang realisasinya menjadi rata-rata 100%. Adanya kenaikan realisasi 15% berpengaruh pada kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang.

7. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan karakteristik rencana berkualitas tinggi, yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan rencana akan dipantau dan bagaimana hasil yang diinginkan akan dievaluasi (Guyadeen, 2018). Karakteristik rencana ini biasanya mencakup pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk pemantauan dan evaluasi, menentukan garis waktu untuk melacak perubahan kondisi yang terkait dengan rencana, menguraikan indikator yang akan digunakan untuk penilaian, dan menyoroti data untuk indikator yang diberikan. Tugas badan perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan daerah yang merupakan isu strategis di Kabupaten Sumedang. Secara umum kendala yang dihadapi dalam proses pemantauan dan evaluasi yaitu dalam optimalisasi *quality control* dikarenakan kualitas dan kuantitas kesediaan data.

Badan perencanaan pembangunan daerah harus memantau dan mengevaluasi dampak inisiatif pembangunan di daerah. Proses tersebut menjadi pedoman bagi Bappppeda Sumedang menilai kemajuan menuju tujuan dan sasaran, mengidentifikasi kesenjangan atau tantangan, dan membuat penyesuaian strategi sesuai kebutuhan. Pemantauan dan evaluasi membantu memastikan bahwa upaya pembangunan daerah tetap pada jalurnya dan bahwa sumber daya digunakan secara efektif.

8. Koordinasi

Koordinasi menjelaskan bagaimana perangkat daerah, baik internal maupun eksternal, dapat bekerja sama satu sama lain untuk mengimplementasikan rencana tersebut. (Guyadeen, 2018). Koordinasi dalam perencanaan pembangunan membutuhkan pembagian data, informasi, dan pengetahuan yang relevan di antara para pemangku kepentingan. Berbagi data dan informasi memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi, mengidentifikasi saling ketergantungan, dan mempromosikan perencanaan berbasis bukti. Fungsi koordinasi yang dimiliki oleh Bappppeda Kabupaten Sumedang menjadi salah satu unsur yang berpengaruh terhadap pelayanan yang profesional dan responsif. Hal ini dapat mempengaruhi pada terwujudnya perencanaan yang adaptif dan responsive terhadap tantangan, serta menciptakan kualitas seluruh perangkat daerah sehingga terwujudnya birokrasi yang adaptif, responsive dan professional.

9. Organisasi dan presentasi

Organisasi dan presentasi berkaitan dengan aspek komunikatif dari sebuah rencana yang mendorong penggunaannya dan membantu pembaca untuk memahami prinsip dan gagasan utamanya. Rencana yang terorganisir dengan baik dan disajikan ramah pengguna, mudah dibaca, dan terhubung dengan kebutuhan dalam komunitas. (Bunnell dan Jepson, 2011). Organisasi dan presentasi dalam perencanaan pembangunan mengacu pada struktur, format, dan komunikasi dokumen perencanaan dan informasi untuk menyampaikan rencana pembangunan dan konten terkait secara efektif kepada berbagai pemangku kepentingan yang ada pada Bappppeda Sumedang.

Bappppeda Kabupaten Sumedang sebagai perangkat daerah yang mengkaji secara strategis dalam kerangka pemerintahan sebagai pelaksanaan program dan kegiatan strategis dengan tetap mempertimbangkan struktur, format, dan komunikasi dokumen perencanaan dan informasi yang tersedia. Dokumen perencanaan pembangunan biasanya disusun untuk memberikan arus informasi yang jelas dan logis termasuk bagian seperti ringkasan eksekutif, pengantar, latar belakang / konteks, tujuan dan sasaran, strategi dan tindakan, rencana implementasi, pemantauan dan evaluasi, dan lampiran. Struktur membantu pembaca menavigasi dokumen dan menemukan informasi spesifik dengan mudah.

Selain itu, organisasi dalam perencanaan pembangunan daerah mengacu pada penataan dan koordinasi kegiatan, proses, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan di tingkat daerah. Perencanaan pembangunan daerah biasanya dikoordinasikan dan difasilitasi oleh otoritas atau departemen perencanaan daerah dalam struktur pemerintah daerah.

V. Kesimpulan

Dengan menyadari pentingnya dalam perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan selaras, studi ini menemukan bahwa dalam menentukan kualitas perencanaan pembangunan daerah memiliki indikator kualitas perencanaan pembangunan daerah yang baik yaitu kebijakan (visi, misi, nilai dan prinsip), fakta, keterlibatan pemangku kepentingan, tujuan umum, sasaran khusus, implementasi, pemantauan dan evaluasi, koordinasi, dan perencanaan organisasi dan presentasi.

Penelitian ini menjelaskan terkait kualitas perencanaan pembangunan daerah terutama pada Bappppeda Kabupaten Sumedang. Sebagai pemula, kami menyadari keterbatasan dalam artikel ini sehingga penulis tidak menganalisis pada semua perangkat

daerah, tetapi hanya pada Bappeda Kabuapten Sumedang dan penulis menemukan beberapa keberhasilan dan hambatan. Keberhasilan yang dilaksanakan yaitu adanya peningkatan pada keterlibatan unsur pemangku kepentingan dan peningkatan intensitas koordinasi perencanaan antar perangkat daerah yang terlibat dengan Bappeda. Hambatan yang ditemui yaitu proses pemantauan dan evaluasi terutama pada optimalisasi *quality control* data. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis yang komparatif terhadap kualitas perencanaan pembangunan antar pemerintah daerah. Terlepas dari keterbatasan studi kami, kami percaya bahwa penelitian kami akan berkontribusi pada kemajuan pengetahuan di bidang pembangunan, khususnya dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

VI. Daftar Pustaka

- Ade Parlaungan Nasution, (2020), Strategi Pembangunan Daerah dalam Meningkatkan Mutu Sumbe Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akutansi (EBMA), Vol.1 No 2, <https://doi.org/10.36987/ebma.v1i2.2170>
- Baskici, C. and Ercil, Y. (2020), "In pursuit of information: evaluating strategic plans", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 50 No. 2, pp. 185-201. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-03-2019-0037>
- Berke, P., & Godschalk, D. (2009). Searching for the Good Plan: A Meta-Analysis of Plan Quality Studies. *Journal of Planning Literature*, 23(3), 227–240. <https://doi.org/10.1177/0885412208327014>
- Dave Guyadeen (2018) Do Practicing Planners Value Plan Quality? Insights From a Survey of Planning Professionals in Ontario, Canada, *Journal of the American Planning Association*, 84:1, 21-32, DOI: <https://doi.org/10.1080/01944363.2017.1404486>
- Ferdian Nur (2021) Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Vol 4 No 2, Fair Value Jurnal Ilmiah akutansi dan Keuangan, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial%20Masalah%202.756>
- Gene Bunnell & Edward J. Jepson Jr. (2011) The Effect of Mandated Planning on Plan Quality, *Journal of the American Planning Association*, 77:4, 338-353, DOI: <https://doi.org/10.1080/01944363.2011.619951>
- Heidrich, O., Dawson, R.J., Reckien, D. *et al.* (2013). Assessment of the climate preparedness of 30 urban areas in the UK. *Climatic Change* 120, 771–784 <https://doi.org/10.1007/s10584-013-0846-9>
- Horney, J., Nguyen, M., Salvesen, D., Dwyer, C., Cooper, J., & Berke, P. (2017). Assessing the Quality of Rural Hazard Mitigation Plans in the Southeastern United States. *Journal of Planning Education and Research*, 37(1), 56–65. <https://doi.org/10.1177/0739456X16628605>
- J.D. Alden & A.H. Awang (1985) Regional development planning in Malaysia, *Regional Studies*, 19:6, 495-508, <https://doi.org/10.1080/13928619.2005.9637706>

- Jhon. M. Bryson, (2018), *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement*, Canada: Jhon Wiley & Sons
- Johan Burger (1997) A strategic development management orientation for local authorities, *Development Southern Africa*, 14:1, 79-96, DOI: <https://doi.org/10.1080/03768359708439951>
- Khan, J. (1999). *Implementing Development Initiatives*. *Vision*, 3(2), 37–46. <https://doi.org/10.1177/097226299900300207>
- Lawrence, J. & Tar, U.. (2013). The use of Grounded theory technique as a practical tool for qualitative data collection and analysis. *Electronic Journal of Business Research Methods*. 11. 29-40.
- Lyles, W., Berke, P., & Smith, G. (2016). Local plan implementation: assessing conformance and influence of local plans in the United States. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 43(2), 381400. <https://doi.org/10.1177/0265813515604071>
- Mukmin, Muhammad. (2017). *Perencanaan Pembangunan*. Makassar: CV. Dua Bersaudara
- Nurcholif, Hanif, Milwan, Tijan, and Hardi Warsono. (2009). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. 1st ed. ed. Djony Herfan. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Philip Berke, David R. Godschalk, Daniel A. Rodriguez and EJ Kaiser, (2006), *Urban land use planning*, University of Illinois Press
- Philip R. Berke (1994) *Evaluating environmental plan quality: the case of planning for sustainable development in New Zealand*, *Journal of Environmental Planning and Management*, 37:2, 155-169, <https://doi.org/10.1080/09640569408711967>
- Pravakar Sahoo & Ashwani Bishnoi (2016), *Role of Japanese official development assistance in enhancing infrastructure development in India*, *Contemporary South Asia*, 24:1, 50-74, DOI: <https://doi.org/10.1080/09584935.2015.1135307>
- Pravakar Sahoo & Ranjan Kumar Dash (2009) *Infrastructure development and economic growth in India*, *Journal of the Asia Pacific Economy*, 14:4, 351-365, DOI: <https://doi.org/10.1080/13547860903169340>
- Remigijus Čiegis, Dainora Grundey & Dalia Štreimikiene (2005) *Economic aspects of cities sustainable development strategic planning*, *Ukio Technologinis ir Ekonominis Vystymas*, 11:4, 260-269, <https://doi.org/10.1080/13928619.2005.9637706>
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Dupriyadi. (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Roy K. Frick, (1976), *Development Planning: The Systematic Application of Technological Innovation*, *Journal of the Operational Research Society*, 27:1, 199-207, DOI: <https://doi.org/10.1057/jors.1976.35>

S. Kennedy, (2011), Stakeholder Management for Sustainable Development Implementation: Kasus Sistem Drainase Perkotaan Berkelanjutan, *Jurnal Akuntabilitas Sosial dan Lingkungan*, 31:2, 139-153, DOI: <https://doi.org/10.1080/0969160X.2011.593818>

Stevens, M. R., Lyles, W., & Berke, P. R. (2014). Measuring and Reporting Intercoder Reliability in Plan Quality Evaluation Research. *Journal of Planning Education and Research*, 34(1), 77–93. <https://doi.org/10.1177/0739456X13513614>

Thaneshwar Bhusal & Ganesh Prasad Pandeya,(2022) Ordinary people's participation in local development planning in Nepal, *Development in Practice*, 32:2, 163-174, DOI: 10.1080/09614524.2021.1907538

William C. Baer (1997) General Plan Evaluation Criteria: An Approach to Making Better Plans, *Journal of the American Planning Association*, 63:3, 329-344, DOI: <https://doi.org/10.1080/01944369708975926>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).